PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

UNIT KERJA : **DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **LILIK ARIJANTO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **898697**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 7.358.421.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/78 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 511.935.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 524.460.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/134 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 611.160.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/154 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.012.500.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 1438 m2/110 m2 di KAB / KOTA GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.013.166.000
7. Tanah Seluas 162 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/252 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.710.200.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 546.000.000

1. MOTOR, HONDA CBR 150 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA CMX500AH IN M/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

3. MOBIL, HONDA ODYSSEY 2.4E Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. MOBIL, TOYOTA INOVA VENTURER Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**780.000.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**1.743.630.970**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**2.490.021.345**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**12.918.073.315**
III. HUTANG		**Rp.**	**----**
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		**Rp.**	**12.918.073.315**

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.